



## Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Batam.

<sup>1</sup>Rosa Hutahaen, <sup>2</sup>Timbul Dompok.

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Putera Batam.

Correspondance author: [pb201010023@upbatam.ac.id](mailto:pb201010023@upbatam.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 10 Desember

Revisi Akhir: 20 Desember

Diterbitkan Online: 25 Desember

### KEYWORDS

*Policy Evaluation, Road Maintenance, Urban.*

### KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: [pb201010023@upbatam.ac.id](mailto:pb201010023@upbatam.ac.id)

### A B S T R A C T

This research examines the important role of the government, especially the Batam City Bina Marga Service, in maintaining and repairing city roads. The length of roads in Batam City reaches 917.20 km, with some still damaged, which causes difficulties and accidents for the community. The research method used is qualitative, with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Research findings show that officials at the Bina Marga Service need special expertise in the road sector and use the Personnel Information System (SIMPEK BATAM) for performance evaluation. Institutional road maintenance involves coordination between the central and regional governments through the Development Planning Conference (Musrenbang). The Highways Department is equipped with adequate facilities, infrastructure, technology and sufficient financial support.

## Pendahuluan.

Jalan Salah satu bagian dari infrastruktur yang merupakan bagian sangat penting diberbagai pemabangunan skala nasional dan daerah (Herdiani, 2018). Di Indonesia dalam pembangunan daerah terdapat tiga hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah tersebut yaitu merupakan listrik, Air, serta Jalan (Sriwati et al., 2024). Maka dengan demikian pemerintah pusat wajib memberikan perhatian kepada daerahnya di berbagai infrastrukturnya yang bertujuan untuk menunjang pada kemajuan suatu wilayah tersebut. Salah satu yang menjadi kunci utama dalam pembangunan pada ekonomi masyarakat

yaitu dimana tersediannya sarana umum yang baik, dimana yang merupakan sarana umum itu adalah meliputi jalan penghubung dalam kota, antar kabupaten, serta jembatan listrik dan kepentingan publik lainnya.

Kondisi jalan di Indonesia pada saat ini selalu menjadi permasalahan publik dimana jalan di Indonesia masih bayak kekurangan sehingga banyak pengaduan public mengenai jalan di setiap berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia dimana telah mengeluarkan yaitu Undang – Undang Republik yang dimana didalamnya membahas mengenai jalan yaitu terdapat di UU RI Nomor 38 Tahun

2004 tentang jalan. Adapun isi di dalam UU No 38 tahun 2004 menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang dimana meliputi di berbagai bagian jalan yang dimana dimaksud untuk sebagai pelengkap dan perlengkapannya yang di berikan untuk lalu lintas, yang keberadaannya ada di permukaan tanah, dan diatas permukaan tanah, kecuali yaitu jalan kereta api dan jalan lori.

Ada pun peran jalan dalam Pasal ini menyebutkan yaitu Jalan sebagai landasan komponen dalam peran penting pada bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik dan dalam pertahanan serta keamanan, dan juga untuk kemakmuran pada rakyat. Jalan juga landasan pada sebuah prasarana dibidang distribusi barang serta jasa yang dimana menjadi inti penting pada kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Jalan adalah landasan dalam satu kesatuan pada sistem jaringan yang menghubungkan serta mengikat pada seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dari data yang diperoleh menjelaskan bahwa Panjang jalan di kota Batam yang dimana menjadi tingkat kewenangannya pemerintah Kota Batam pada tahun 2023 yaitu dengan Panjang 917.20 km. awal tahun 2023 jalan provinsi dilakukan adanya pengalihan jalan kepada pemerintahan Kota Batam ke Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Namun fakta yang terjadi dilapangan di Jalanan Kota Batam yang merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau.

Banyak masyarakat Kota Batam memberikan pengaduan publiknya kepada pemerintah yaitu Dengan melalui batam pos mengenai kerusakan jalan Kota yang parah di Kota Batam yang ada di terdapat beberapa pengaduan masyarakat di berbagai media sosial Kota Batam mengenai kerusakan jalan yang ada di Kota Batam sumber dari Tribun Batam Jalan rusak di Batam warga mengeluh , jalan selasih rusak hingga bergelombang dimana pengaduan ini terdapat di tribunnews Batam.

Keluhan Masyarakat secara umum, ada beberapa ruas jalan yang bergelombang seperti jalan di simpang kuda Batam hingga ke daerah Bengkong yang berpotensi membahayakan kendaraan. Selanjutnya kerusakan jalan yang cukup parah di jalan Laksamana Bintan, di depan Kawasan Industri Hijrah Batam *Center*, akibat kerusakan jalan tersebut cukup parah sehingga menyebabkan kendaraan kesulitan saat melintas dan hampir semua ruas jalan berlubang dan rusak Kondisi dan Panjang jalan di Kota di Kota Batam pada tahun 2023 yaitu 917.20 km. adapun kondisi jalan di kota Batam pada tahun 2023 yaitu: Panjang jalan kondisi baik terdapat 733.91 km, dan Panjang jalan terpelihara 47.74 km, dan Panjang jalan kondisi rusak 50.79 km. terdapat 733.91 km, dan Panjang jalan terpelihara 47.74 km, dan Panjang jalan kondisi rusak 50.79 km. jalan di Kota Batam pada tahun 2023 masih terdapat Panjang jalan dengan kondisi berat yaitu 51.72 km dan dengan Panjang jalan dengan kondisi sedang 80.78 km kemudian Panjang jalan dengan jenis

permukaan aspal 739.99 km atau dan sedangkan panjang jalan dengan jenis permukaan kerikil 9.19 km dan yang terakhir panjang jalan dengan jenis permukaan tanah yaitu 42.45 km.

Berdasarkan dari penjelasan diatas mengenai permasalahan yang ada maka adapun identifikasi masalah diatas yaitu: Masih banyak kondisi jalan kota yang rusak sejak 2021-2023 saat ini menjadi rata-rata 6,9%. Akibat dari kerusakan jalan tersebut membuat masyarakat kesulitan saat melintas, dan megabikatkan kecelakaan pada masyarakat. Panjang jalan kota di Kota Batam yaitu 917.20 km sebagian dari itu masih terdapat kerusakan jalan yang tidak terpelihara dengan baik yaitu 184.14 Km.

Penelitian ini akan menganalisis masalah Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Kota Batam dan Faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Batam?

### **Literatur Review.**

Kebijakan publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas diberbagai bidang yaitu seperti sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum dan sebagainya. Maka dengan demikian kebijakan public dapat dilihat dari sisi samping yaitu hierarkinya, yang dimana kebijakan public dapat bersifat rasional, regional, maupun lokal yakni seperti undang-undang, peraturan pemerintah daerah/ provinsi, dan keputusan gubernur, serta peraturan daerah dari kabupaten/ kota, dan juga Keputusan dari bupati/ walikota. Menurut Budi Winanrno (2020:17) mengartikan kebijakan public yaitu

sebagai hipotesis yang terdapat bentuk kondisi-kondisi awal dan juga akibat -akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan public tersebut harus ada perbedaan dengan bentuk bentuk kebijakan yang lainnya, seperti kebijakan swasta. Sedangkan menurut Robert Eyestone yang telah dikutip oleh Leo Agustino (2020:6) mengartikan kebijakan public yaitu seperti hubungan antara unit pemerintah dengan semua lingkungannya.

Menurut George C. Edwards III (2020:17-18) terdapat beberapa variable yang dimana mempengaruhi pada keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Komunikasi,
- 2) Sumber daya,
- 3) Disposisi,
- 4) Stuktur birokrasi

Evaluasi kebijakan yaitu berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik yang dimana dikarenakan adanya sebuah kajian evaluasi yang harus mampu memenuhi esensi dari akuntabilitas Yaitu antara lain sebagai berikut: Melakukan eksplanasi yang logis atas dasar dari realitis pada pelaksanaan pada suatu program, atau kebijakan. dengan melalui evaluasi maka disini evaluator dapat menemukan yaitu variabel- variabel kebijakan yang diman akan mempengaruhi pada keberhasilan pelaksanaan pada suatu program. Mengukur kepatuhan, dimana maksudnya adalah apakah mampu melihat pada kesesuaian pada antara pelaksanaan yang dengan standar serta pada prosedur yang dimana telah ditetapkan. Untuk melakukan sebagai auditing dalam melihat output kebijakan apakah sampai pada sasaran yang akan dituju,

kemudian ada tidaknya penyimpangan terhadap melaksanakan program tersebut. Akunting yaitu melihat serta mengukur dari akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut

Evaluasi kebijakan menurut model Leo Agustino (2016:196) terdapat lima kriteria yaitu:

1. Sumber Daya Aparatur (SDA). Keberhasilan yang ada pada suatu pelaksanaan kebijakan dan selanjutnya maka akan dievaluasi hasilnya yaitu dilakukan oleh sumber daya aparatur (SDA). Maksudnya adalah pada saat evaluatuor melakukan evaluasi maka, yang untuk pertama kali dievaluasi yaitu aparatur yang pertama dievaluasi, supaya untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dibuat.
2. Kelembagaan. Adapun yang termasuk dalam konteks kelembagaan ini yaitu koordinasi yang lancar, dari diskresi yang fleksibel dan juga sistem pada organisasi, pola kepemimpinan, yang menjadikakn indikasi arah evaluasi yang positif. Maka dengan demikian pada halnya evaluasi kebijakan, apabila pada koordinasi tidak lancar, dan direksi yang fleksibel, dan pada sistem

organisasinya terlalu kaku serta komando pada pola kepemimpinan yang otokratik maka akan dapat membuat suatu kebijakan tidak akan berhasil.

3. Sarana, Prasarana dan Teknologi. Pada kriteria ini akan dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan, Ketika dilakukanya evaluasi apakah pemerintah menyediakan banyak sarana dan prasarana serta teknologi.
4. Finansial. Finansial merupakan salah satu dukungan dari evaluasi kebijakan, finansial merupakan dukungan dari pemerintah yang dimana dalam melakukan evaluasi kebijakan akan lancar dan baik apabila adanya dukungan finansial.
5. Regulasi (pendukung) Pada suatu kebijakan maka sering memerlukan yaitu regulasi pendukung, dimana bertujuan agar dapat dioperasionalkan menjadi lebih aplikatif. Pada era orde baru, maka suatu kebijakan ada terdapat berupa dukungan yaitu petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis dimana supaya untuk memudahkan pada banyak pihak yang menjadi subjek pada suatu kebijakan dalam melakukan mengoperasionalkan kebijakan

tersebut. Maka dengan demikian evaluasi kebijakan akan dapat dinilai dan keberhasilannya akan sangat dipengaruhi yaitu ada atau tidaknya regulasi pendukung.

Terdapat beberapa faktor yang dimana kebijakan tidak dapat mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini disebabkan ada 5 faktor menurut (Dye 2010:155) yaitu: pertama, Adanya keterbatasan dana sehingga mengakibatkan program tersebut menjadi gagal. Kedua, Adanya kesalahan administrasi sehingga yang dimana ditunjukkan dengan misi kebijakan, walaupun isi dari kebijakan tersebut baik namun administrasi kebijakan tersebut sangat jelek, maka implementasi dari kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan.

Ketiga, Kurang adanya komprehensifnya dan tujuan serta sasaran yang jelas pada pertimbangan kebijakan, dimana hal ini disebabkan karena para pembuat kebijakan hanya memperhatikan beberapa faktor-faktor tertentu saja. Keempat, Kebijakan publik tersebut yang bertentangan dengan kebijakan lainnya. Dimana harus ada dukungan dan partisipasi dari pemangku kepentingan lainnya. Kelima, Adanya usaha pada pemecahan masalah yang cukup besar pada sumber yang lebih kecil dari pada bobot masalah itu sendiri dan ketersediaan dan kualitas data, maka evaluasi harus memerlukan data yang akurat dan memadai.

## **Metodologi.**

Jenis metodologi penelitian yaitu kualitatif. pada proses pengumpulan dari kata – kata atau frasa yang berasal dari orang-orang, buku -buku dan juga sumber– sumber lainnya yang dimana dikenal dengan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian ini memilih dan mengidentifikasi berbagai sumber untuk mengumpulkan data dan informasi. Pemilihan informan penelitian didasarkan pada pemahaman khususnya penilaian terkait kebijakan pemeliharaan jalan Kota Batam. Sumber data yaitu primer melalui wawancara dan sekunder menggunakan literatur berupa buku, dokumen dan hasil-hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan ialah triangulasi.

## **Hasil Dan Pembahasan.**

Sejauh mana evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Batam yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimana dengan menggunakan alat dan sumber yang dimana telah tersedia dalam mencapai visi dan misi sehingga dapat diukur untuk menghitung tingkat dari perwujudan sasaran dan untuk menunjukkan sudah sejauh mana sasaran tersebut telah tercapai.

### **1. Sumber Daya Aparatur**

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Bina Marga Kota Batam merupakan indikator dari pelaksana evaluasi kebijakan yang dimana pada pelaksanaan kebijakan yang terlibat dalam evaluasi maka harus ada ketersediaan sumber daya aparatur yang memadai supaya dapat

mengetahui sudah sejauh mana sumber daya aparatur tersebut memahami apa yang harus dikerjakan pada Dinas Bina Marga Kota Batam. Dinas Bina Marga Kota Batam.

Kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Batam pada pelaksanaannya sudah memiliki keahlian pada sumber daya aparatur yang dimana pada saat penerimaan Aparatur harus mengikuti syarat- syarat dan juga harus ada sertifikat-sertifikat dan juga harus memiliki keahlian dalam kemampuan dibidang jalan, dan juga pada untuk evaluasi kinerja sumber daya aparatur yang dilakukan oleh badan kepegawaian pun sudah efektif yaitu dengan adanya sitem informasi kepegawaiannya. Untuk melihat kualitas dari Sumber Daya Aparatur Dinas Bina Marga Kota Batam, dilihat dari laporan-laporan kinerja setiap bulan dan laporan kinerja tahunan yang ada sistem Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

## 2. Kelembagaan

Pada indikator kelembagaan ini merupakan peran antar lembaga yang dimana terkait dalam pemeliharaan jalan kota di Kota Batam. Yaitu dimana adanya koordinasi yang baik dengan direksi dan juga sistem pada organisasi, pola pimpinan yang ada pada Dinas Bina Marga terkait dalam evaluasi kebijakan di Dinas Bina Marga Kota Batam. Dina Bina Marga dalam evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan di Kota Batam sudah berkoordinasi dengan baik, dengan diakan musrenbang dari masyarakat, pemerintahan daerah, pemerintahan Pemko Batam, dan juga DPRD. Dan juga

kelambagaan juga memberikan sumber daya aparatur yang cukup pada pengelolaan pemeliharaan jalan di Kota Batam sehingga jalan di Kota Batam setiap tahunnya menjadi bagus dan baik.

## 3. Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Sarana, Prasarana, dan Teknologi pada indikator ini merupakan untuk penelaian dari optimalisasi pada pelaksanaan evaluasi kebijakan, yang dimana untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan dari implementasi dalam pemeliharaan jalan di Kota Batam. sarana, prasaranam dan teknologi yang digunakan oleh Dinas Bina Marga pada pemelihaaran jalan kota di Kota Batam yaitu telah memadai dan berkualitas. Dan adapun peralatan yang digunakan harus melalui proses kalibrasi dan pengujian dengan menggunakan timbangan metrology dan kemudian diperiksa oleh bagian PU, dan akan diberikan sertifikat kelayakan untuk dipakai, proses kalibrasi ini dilakukan setiap tahun dan enam bulan sekali, dan adapun Peralatan yang digunakan yaitu seperti penetrometer dan thermometer inframerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan dalam pengelolaan pemeliharaan jalan kota di Kota Batam.

## 4. Finansial

Finansial merupakan salah satu indikator yang dimana mendukung dalam evaluasi kebijakan dalam melaksanakan dukungan terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan suatau program dari kebijakan. Pada konteks evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan di Kota Batam

kepada Dinas Bina Marga Kota Batam, dimana yang berkaitan dengan bagaimana anggaran yang dialokasikan dalam pemeliharaan jalan di Kota Batam sudah memadai.

Finansial dalam pengelolaan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam oleh Dinas Bina Marga Kota Batam yaitu direncanakan dengan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Dimana proses ini melibatkan masyarakat dan Dinas Bina Marga, dan dalam pengambilan keputusan yaitu oleh Timbangar Pemko dan Timbangar DPRD dalam menentukan arah kebijakan penganggaran. Dan penetapan anggaran dalam pemeliharaan jalan sudah dilakukan tepat waktu dan efisien yang dimana dilakukan pembayaran setiap anggran lima tahun disetiap tahunnya.

#### 5. Regulasi

Regulasi atau pendukung merupakan unsur yang terpenting dalam pelaksanaan kebijakan, Regulasi yaitu merupakan salah satau sebagai panduan dalam pelaksanaan dalam pentunjuk teknis yang dimana untuk mempermudah banyak pihak dalam melakukan mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Terkait dengan Rugalasi tersebut dalam evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Batam yang dimana dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kota Batam, dan juga apakah regulasi dalam pemeliharaan jalan kota di Kota Batam saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Regulasi atau pendukung pada pemeliharaan jalan kota di Kota Batam yaitu dengan melakukan Musrenbang yang dimana hasil dari musrenbang tersebut adalah masukan dari usulan-usulan dari masyarakat, dan dukungan DPRD, dan dukungan Wali Kota Batam, yang dimana menjadi dasar pembuat kebijakan pada pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan. Dan adapun regulasi dalam meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan kota di Kota Batam yaitu dengan menetapkan standar teknis yang harus dilaksanakan, dan dengan penggunaan alat yang sesuai dengan standar dan memiliki sertifikat layak pakai, dan pada proses pengelolaan tersebut akan diawasi oleh konsultan Dinas Bina Marga Kota Batam. Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Batam.

#### 1. Dana

Dana merupakan salah satu faktor yang dimana sangat mempengaruhi pada kebijakan tersebut, dimana apabila adanya keterbatasan pada dana akan mengakibatkan apa yang akan dilaksanakan atau program apa yang dilakukan akan menjadi gagal dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak dapat terjadi. Untuk alokasi dana pada pemeliharaan jalan di Kota Batam sudah di laksanakan dengan secara proporsional yang dimana sesuai dengan dana yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, dana untuk pemeliharaan jalan di Kota Batam merupakan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi pemeliharaan jalan sudah sesuai dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada Dina Bina Marga,

tetapi sering terjadi kendala yaitu dalam bentuk biaya yang tak terduga, yaitu pada kerusakan jalan yang ditemukan selama proses pemeliharaan ternyata lebih parah dari perkiraan awal, sehingga dapat mempengaruhi dana yang diperlukan. Maka dengan demikian hal ini menunjukkan yaitu perlu adanya perencanaan yang dimana lebih fleksibel pada alokasi dana Cadangan untuk menangani situasi yang tak terduga pada pemeliharaan jalan.

## 2. Administrasi

Administrasi merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu kebijakan dimana administrasi merupakan visi dan misi dari kebijakan tersebut, apabila administrasi tersebut jelek maka kebijakan tersebut pun akan gagal dalam pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Batam. Dinas Bina Marga dalam pengelolaan pemeliharaan jalan di Kota Batam kebijakannya sudah dilakukan dengan baik dan tersistem. Pada setiap pelaksanaan program atau proyek pemeliharaan jalan maka harus ada bukti dokumentasi yang lengkap dan juga laporan proyek dan kemudian akan diperiksa oleh konsultan pengawas supaya memastikan pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan sesuai dengan rencana. Dan juga administrasi pemeliharaan jalan di Kota Batam telah menggunakan teknologi yaitu sistem Software Manajemen Proyek, yang dimana mempercepat sistem kerja administrasi menjadi lebih efisien dan responsif.

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran ini menjadi merupakan hal yang jelas dalam pembuatan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka apabila kurang adanya tujuan dan sasaran yang tidak jelas maka akan sangat mempertimbangkan dari kebijakan tersebut. Tujuan dan sasaran pada evaluasi pemeliharaan jalan di Kota Batam oleh Dinas Bina Marga yaitu dengan didasarkan pada data kerusakan jalan yang dimana diperoleh dengan melalui Survei Deficiency Index (SDI).

Survey ini merupakan untuk membantu mengidentifikasi usia pemeliharaan jalan dan kondisi kerusakannya. Dan untuk mencapai efektivitas dalam pemeliharaan jalan tersebut harus sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Maka Dinas Bina Marga melakukan perencanaan yang sebaik mungkin dalam mempertimbangkan hasil survey. Ketersediaan dana, dan jenis kerusakan baik ringan maupun berat. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemeliharaan jalan dilakukan dengan secara tepat sasaran dan sesuai dengan anggaran yang dimana telah dialokasikan oleh pemerintah daerah, dan sehingga tujuan pemeliharaan jalan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

## 4. Dukungan dan Partisipasi dari Pemangku Kepentingan.

Dalam melakukan kebijakan pasti ada terdapat beberapa kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan lainnya, maka dengan demikian harus ada dukungan dan partisipasi dari pemangku kepentingan lainnya, supaya

kebijakan. dalam pemeliharaan jalan di Kota Batam, dapat berjalan dengan baik, dan berjalan sesuai apa yang telah ditentukan. Dukungan dan partisipasi dari pemangku kepentingan sangatlah penting dalam pemeliharaan jalan di Kota Batam. Yang dimana masyarakat sebagai partisipan aktif, pada memainkan peran penting pada proses ini karena partisipasi masyarakat tersebut dapat mendorong Dinas Bina Marga untuk lebih akuntabel dalam melaksanakan pemeliharaan jalan. Dan juga Dinas Bina Marga Kota Batam menerima dukungan yang baik dari pemerintah daerah dan masyarakat dengan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Maka dengan ada kegiatan ini memungkinkan adanya masukan dan usulan dari berbagai pihak untuk mendukung proses pelaksanaan pemeliharaan jalan yang lebih baik lagi di Kota Batam.

#### 5. Ketersediaan Data dan Kualitas Data

Dalam melakukan evaluasi kebijakan dalam pemeliharaan jalan di Kota Batam maka harus adanya ketersediaan data dan kualitas data yang baik. Ketersediaan dan kualitas data pada evaluasi pemeliharaan jalan sangat penting bagi Dinas Bina Marga di Kota Batam. Yang para pelaksana kebijakan melakukan survey kerusakan jalan yang dimana berisikan data-data kerusakan, sehingga Dinas Bina Marga dapat mengelola pemeliharaan jalan dengan lebih efektif.

Dengan data yang diperoleh dari survey tersebut memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan dapat lebih akurat, selain itu metode survey kondisi jalan

yang digunakan sesuai dengan standar Kementerian Pekerjaan Umum yang dimana untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan yaitu akurat dan terpercaya. Dan dengan ketersediaan data dan kualitas yang baik Dinas Bina Marga dapat melakukan pemeliharaan jalan di Kota Batam menjadi lebih efisien dan tepat saranya.

#### Simpulan.

Evaluasi kinerja untuk Sumber Daya Aparatur di Dinas Bina Marga yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEK BATAM). Dan untuk proses pada perencanaan pemeliharaan jalan yaitu melibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang isinya yaitu membahas tingkatan, dengan partisipi masyarakat, Pemko Batam dan DPRD. Untuk kualitas sarana, prasarana, dan teknologi di Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan kota di Kota Batam sudah cukup dan memadai dan juga sudah dikalibrasi sebelum pemakiannya.

Anggaran untuk pemeliharaan jalan yaitu sudah memadai dan disusun dengan melalui Musrenbang dan kemudian disetujui oleh Pemko Batam dan DPRD. Kemudian untuk evaluasi pemeliharaan jalan yaitu dengan menggunakan data yaitu dengan Survei Dificiency Index (SDI) yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam, kemudian dukungan masyarakat, serta pemangku kepentingan juga dalam mendorong

pada akuntabilitas Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam dan untuk proses pada perencanaan pemeliharaan jalan yaitu melibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang isinya yaitu membahas tingkatan dengan partisipasi masyarakat, Pemko Batam dan DPRD.

Untuk kualitas sarana, prasarana, dan teknologi di Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan kota di Kota Batam sudah cukup dan memadai dan juga sudah dikalibrasi sebelum pemakiannya. Anggaran untuk pemeliharaan jalan yaitu sudah memadai dan disusun dengan melalui Musrenbang dan kemudian disetujui oleh Pemko Batam dan DPRD. untuk evaluasi pemeliharaan jalan yaitu dengan menggunakan data yaitu dengan Survei Deficiency Indek (SDI) yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam. Dukungan masyarakat, serta pemangku kepentingan juga dalam mendorong pada akuntabilitas Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam.

### Daftar Pustaka.

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Agustina, R. (2023). *Evaluasi kebijakan perbaikan jalan dan penerangan jalan* Rosa Hutahaen, Timbul Dompak
- untuk kelancaran aktivitas warga di jatinangor kota sumedang. 01, 39–43.
- Ajawaila, L. G., Rompas, W. Y., & Tulusana, F. M. G. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi, VII(104), 19–26. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33693/31878>.
- Amanda, P. I. (2019). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. In TheJournalish: Social and Government (Vol. 1, pp. 34–38).
- Dilapanga, A. R. (2019). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRASI) 1(1). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.999>.
- Fitriani, A. (2019). *Kebijakan Penanganan Pemeliharaan Jalan*. FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang., 16(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v16i2.206>
- Hajaroh, M. (2019). *Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)*. Foundasia, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>.
- Hakim, M. L. Al. (2015). *Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya*. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(1), 1–11.
- Handoyo, E. (2010). *Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik*. Jurnal MEDTEK, 2(3), 78–91.

- Herdiani, H. (2018). *Peran Pemerintah Kota Bandung dalam Pemeliharaan Jalan Braga sebagai Kawasan Heritage*. *Jurnal Aspirasi*, 8(2), 104–107. Issn, J. (2023).  
[Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB) ISSN : 2723-0937. 6, 172–180.
- Kristian, I. (2021). *Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung*. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23–34.  
<https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.4> Kualitatif, A. D. P. (n.d.). Bab 10. 157–165.
- Nurmayana, S. (2022). 4-Article Text-3-1-10-20180907. *Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator*, Vol 1 No 7(2), 46-6Pusat, M. J. (2018). No Title. 21(2), 46–65.5.
- Oktaviani, V. P. (2024). *Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak pada SMPN 18 Kota Tangerang Selatan*. 5(1).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*.
- Riyanda, R., & Dompok, T. (2017). *Kebijakan Parkir Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Niara*, 10(1), 21–29.  
<https://doi.org/10.31849/nia.v10i1.1885>
- Santoso, E. B., Moenek, R., & Nurpahdi, M. (2019). *Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 17–32.  
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.351> .
- Sriwati, E., Setiawati, B., & Tahir, N. (2024). *Peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur*. *Jurnal Kimap: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 5(1), 104–116.